



Demokrasi Ekonomi : Reposisi Peran Fungsi Negara Dan Bisnis Dalam Rangka Pencapaian Kesejahteraan Umum

Azhar Syahrir

¹Department of Industrial Engineering, Faculty of Technic, Pelita Bangsa University

Korespondensi email: azhar.syahrir@pelitabangsa.ac.id

Abstraksi

Democracy and Economy are the two most basic things in determining the existence of a country in the eyes of the world. This paper contains a scientific framework to provide alternative ideas and thoughts about contemporary problems that have placed human beings not as subjects of national economic civilization but instead as economic objects in inhumane and ethical relationships. The thoughts and ideas in this paper also want to provide a scientific answer to the role of business and the state in realizing general well-being as mandated as the state's goal in the preamble of the 1945 Constitution. The method used in this paper is the study of literature and the exploration of thought about empirical facts. In state relations and business development in the perspective of spatial political economy. The conclusion of the paper contains 4 ideas which are related to laying a strong economic foundation with a high level of community participation, economic democracy is expected to be an alternative solution in placing the role and function of business development, economic democracy can minimize horizontal conflict, and equitable access and availability of infrastructure is even between regions.

Keywords: Economic Democracy, Functions of the State, Business, Public Welfare

I. Pendahuluan

“Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak cucu kita, maka kembalikanlah secara utuh..!” (Mahatma Gandhi)

Sudah merupakan kenyataan hari ini, dimana ruang eksploitasi tidak saja terkait dengan sumber daya alam tapi menjalar hingga kepada manusia yang ada di hampir seluruh belahan bumi. Kata “bumi” dalam nasehat bijak dari seorang guru kehidupan yang bernama Mahatma Gandhi, diartikan tidak hanya sebagai bentuk bumi secara fisik tapi juga terkait dengan segala sesuatu yang

ada di atas permukaannya, termasuk manusia. Manusia disini bisa dipandang sebagai pinjaman dari generasi selanjutnya yang harus diposisikan secara manusiawi, meski berada dalam strata sosial ekonomi yang sangat lemah. Perlakuan layak terhadap manusia secara pantas, tidak selalu terjadi dalam dunia ekonomi kapitalis. Sebuah dunia yang memandang dan menempatkan manusia berdasarkan kepemilikan modal dan sumber daya ekonomi lainnya.

Penelitian geografis kontemporer tentang ekonomi alternatif mengeksplorasi keragaman bentuk

pertukaran kegiatan arus utama ekonomi kapitalis dan revitalisasi sistem ekonomi itu sendiri dengan cara yang sensitif terhadap konteks dan menegaskan hubungan dinamis di antara keduanya dalam berbagai skala dan ruang. Pengkajian ini mencoba fokus pada cara hidup ekonomi alternatif yang - karena kebutuhan atau simpati penulis - pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil jauh dari pola perilaku ekonomi kapitalis. Dalam banyak kasus, pemikiran atau praktik seperti ini lebih dari sekadar “proyek” ideologis marjinal. Selain praktik-praktik yang membuat hidup orang bermakna, ada praktik yang mengamankan mata pencaharian dan memberikan solusi berbeda bagi mereka yang kurang mampu mengatasi tantangan sistem ekonomi kapitalis di negara maju dan berkembang, namun masyarakatnya kurang berkembang. Dalam hal ini, pencarian bentuk dan sistem alternatif untuk mengembangkan praktik-praktik arus utama ekonomi yang berupaya untuk merelokasi kekuasaan yang bersifat imperatif dari modal (*capital*) dan ideologinya yang dipaksakan kepada individu atau masyarakat.

Hans-Martin Zademach, seorang Professor dari Economic Geography pada the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, mengatakan bahwa “That is, it not only regards the aforementioned variety of practices but develops a conceptualisation of the economy that is aware of the relationship between the mainstream and its alternatives and acknowledges the coexistence and interrelatedness of

both ‘dominant’ and ‘less powerful’ – thus less recognised – modes of economic coordination”

Di sebagian besar negara maju, telah menetapkan narasi visi hegemonik kapitalisme dalam kaitannya dengan kemajuan dan modernitas. Dengan cara yang sangat sederhana, visi ini menganggap kapitalisme neoliberal sebagai satu-satunya referensi untuk setiap kegiatan ekonomi. Margaret Thatchers yang terkenal dengan “*There is No Alternative*” (TINA) merupakan perwujudan dari pandangan ini. Melalui perjanjian perdagangan bebas dan program penyesuaian struktural, ideologi kapitalis tersebar di luar batas-batas negara maju, dan dengan runtuhnya Uni Soviet dan satelitnya, kolonisasi ruang dan masyarakat yang sebelumnya tidak terkendali tampaknya menguatkan narasi yang kuat terkait perluasan prinsip neoliberal. Logika koordinasi berbasis pasar ini dipandang sebagai suatu sistem yang pada dasarnya, terlepas dari masyarakat (Mingione, 1991). Dengan kata lain, itu diklaim untuk membangun sistem ekonomi yang mewakili objek semu yang netral di luar lingkungan sosial.

Dalam perkembangannya untuk ekspansi di seluruh dunia - model neoliberal serta efek totalisasi dan normalisasi yang dianggap berasal dari kapitalisme - cara-cara alternatif koordinasi ekonomi sengaja dibuat tidak terlihat atau terkesan tidak memiliki arti. Ini dapat dianggap sebagai hasil dari proses diskursif, dimana kapitalisme telah ditetapkan sebagai perangkat koordinasi ekonomi dan sosial yang dominan (dalam istilah

diskursif “*The Self*”), suatu perangkat yang merasuki semua kehidupan dengan seksama sehingga sistem itu sendiri tampak seperti tidak memiliki sisi lain (Gibson-Graham, 1996). Bentuk-bentuk alternatif koordinasi ekonomi, di sisi lain, telah dibangun sebagai “*Others*”, atau seperti Utara (2007: xxii) menempatkannya sebagai “peninggalan pra-kapitalis atau percobaan yang bersifat utopis yang terkutuk”, karena dianggap tidak mampu bersaing dengan kapitalisme dan hanya berbentuk organisasi sosial tertentu.

Kontribusi penting dalam membentuk pemahaman yang berbeda tentang kapitalisme telah dikaji dalam beberapa studi dalam ekonomi politik komparatif yang terkait dengan identifikasi dan diferensiasi model kapitalisme nasional dan makro-regional (Rossi, 2012). Pendekatan populer bidang ini menjadi kerangka kerja bagi varietas kapitalisme / *varieties of capitalism* (VoC) oleh Soskice and Hall (2001). Pendekatan ini berupaya menawarkan penjelasan institusional untuk perbedaan lintas negara dalam perilaku mikro, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan bisnis. Dengan membandingkan kapitalisme / rezim produksi di sepanjang domain institusional yang berbeda (mis. Sistem keuangan, hubungan industri, pendidikan dan sistem pelatihan), pendekatan ini menggunakan visi keanekaragaman kapitalis yang bertentangan dengan representasi ortodoks dari kapitalisme unitarian global. Secara khusus, ia membedakan antara dua tipe dasar kapitalisme yaitu

ekonomi pasar liberal (*liberal market economies*) dan ekonomi pasar terkoordinasi (*coordinated market economies*). Berkenaan dengan perdebatan ekonomi dan ruang alternatif, dua perkembangan yang saling terkait dapat diamati secara ilmiah. Pertama, sistem ekonomi menjadi semakin dipikirkan secara lintas negara. Seperti Fuller et al. (2010a: 21) mengatakan “[T]here has been a shift away from the fixed hierarchical thinking and territorial fetishism associated with concepts of the state, territory and geopolitics.”

Berbagai konsep telah banyak muncul untuk menantang gagasan yang disebutkan sebelumnya dengan menganggap ekonomi sebagai objek netral di luar lingkungan masyarakat. Salah satu informan kunci dari alur penalaran ini adalah konsep tertanam yang dimiliki Polanyi. Pendekatan lain secara dominan dipengaruhi oleh neo dan post-marxist, kaum feminis, dan pendekatan post-kolonial, yang menyerukan pemahaman ekonomi sebagai proses sosial yang dapat ditransformasikan, bukan sebuah kekuatan alam yang kaku.

Makalah ini disusun dalam kerangka ilmiah untuk memberi gagasan dan pemikiran alternatif atas permasalahan kontemporer yang telah memosisikan manusia tidak sebagai subjek peradaban ekonomi nasional tapi menempatkannya sebagai objek ekonomi dalam relasi yang tidak manusiawi dan etis. Pemikiran dan gagasan dalam makalah ini juga sekaligus ingin memberikan jawaban pemikiran yang ilmiah atas peran bisnis dan negara dalam

mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan sebagai tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945.

II. Metodologi

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur dan eksplorasi pemikiran atas fakta empiris dalam hubungan negara dan pengembangan bisnis dalam perspektif ekonomi politik ruang.

Manusia merupakan makhluk sosial (Homo Socius). Dalam memaknai manusia sebagai makhluk sosial ini, Aristoteles menyebutnya dengan julukan Zoon Politicon. Kata Zoon Politicon merupakan padanan kata dari kata Zoon yang berarti "hewan" dan kata politicon yang berarti "bermasyarakat". Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa Zoon Politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan oleh Tuhan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bermasyarakat disini bermakna tidak hanya sekedar interaksi biasa seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup lainnya, namun disertai dengan ada suatu nilai atau budaya yang mengikat manusia satu dengan lainnya. Nilai ini cenderung berbeda antara kelompok masyarakat atau negara satu dengan lainnya. Namun perbedaannya tidak bersifat mutlak, karena ada beberapa nilai yang relatif sama. Nilai inilah yang kemudian disebut sebagai nilai universal. Kalau makhluk lain semisal hewan berinteraksi hanya menggunakan insting semata, berbeda dengan

manusia. Manusia tidak hanya menggunakan instingnya, namun dikombinasikan dengan pikiran rasionalnya. Sedangkan menurut Adam Smith, manusia disebut dengan istilah Homo Homini socius, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Dalam konteks lain, Adam Smith menyebut manusia dengan istilah yakni homo economicus, makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Selain julukan yang bermakna positif, manusia juga menyandang istilah apa yang disebut Thomas Hobbes sebagai Homo Homini Lupus, yang berarti manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Pengembangan sumber daya manusia sangat berhubungan erat dengan usaha untuk meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, peran dan fungsi manusia merupakan suatu asumsi dasar bagi pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun peran dan fungsi sumber daya manusia secara ekonomi diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi.

Produksi merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan bisnis dalam hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan sumber daya pendukung lainnya dalam rangka menghasilkan output berupa produk atau jasa. Layaknya seperti faktor produksi lainnya, sumber daya

manusia juga terbatas. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagai faktor produksi, sumber daya manusia tetap dituntut baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian, fungsi sumber daya manusia sebagai faktor produksi senantiasa terkait dengan bagaimana individu bisa memenuhi tuntutannya atas kontribusinya terhadap perusahaan sekaligus memenuhi ekspektasi perusahaan pemberi kerja.

Sumber daya manusia ini sebagai faktor produksi tenaga kerja terutama dituntut agar dapat menguasai ilmu dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan pada skala mikro dan negara pada lingkup yang lebih luas. Karena semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitasnya. Meskipun untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, juga dibutuhkan biaya pembentukan modal manusia (human capital) yang cukup besar.

2. Sumber daya manusia sebagai proses produksi.

Sumber daya manusia sebagai proses produksi dapat dilihat dari aspek waktu dan jasa yang disumbangkan dalam produksi. Hal ini berarti bagaimana fungsi sumber daya manusia itu dikaitkan dengan produktivitas dalam berjalannya proses produksi. Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan peran dan fungsi sumber daya manusia dalam pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) sebagai tenaga kerja, yang berfungsi untuk mengoptimalkan

produktivitas kinerja yang kompetitif, kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 2) sebagai tenaga ahli, yang berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi profesional; 3) sebagai pemimpin perusahaan, yang berfungsi mengerakkan dan memberi arahan pada karyawan dalam meningkatkan produktivitas; 4) sebagai tenaga usahawan, yang berfungsi menghasilkan produktivitas dan menambah income; 5) sebagai sumber daya manusia yang menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring perkembangan zaman yang menuntut pembangunan ekonomi; 6) sebagai sumber daya manusia yang mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi; 7) Sebagai produsen, yang berfungsi untuk menciptakan, menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang; 8) sebagai konsumen, yang berfungsi untuk menggunakan produk/jasa yang dihasilkan dengan cara membelinya sehingga menjadi pendapatan bagi perusahaan/negara.

3. Peran dan fungsi sumber daya manusia berdasarkan Teori Produktivitas.

Sumber daya ekonomi yang digerakkan secara efektif memerlukan keterampilan manajerial dan teknis, sehingga hasilnya berdaya guna tinggi. Artinya, hasil yang diperoleh sesuai dengan beban biaya yang digunakan. Dengan metode yang tepat maka pemborosan waktu, tenaga, dan input lain dapat dikurangi sekecil mungkin dan tujuan usaha dapat terselenggara secara efektif

dan efisien. Hal inilah yang disebut dengan produktivitas.

Secara filosofis, produktivitas mengandung arti sebagai pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Menurut L.Greenberg, produktivitas adalah perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Produktivitas juga diartikan sebagai perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil serta perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu-satuan unit yang lebih umum. Dalam informasi disampaikan pada konferensi di Oslo tahun 1984, tercantum definisi umum produktivitas yaitu bahwa produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa dengan menggunakan sumber-sumber riil yang semakin sedikit.

Sedangkan secara umum produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya (input) yang dipergunakan per satuan waktu. Pada hakekatnya, produktivitas dapat mengarahkan efektivitas pelaksanaan organisasi secara menyeluruh. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia menuju kepada pengembangan dan peningkatan hidup. Pengukuran produktivitas merupakan alat manajemen yang penting dalam semua tingkatan ekonomi, karena dengan adanya pengukuran terhadap produktivitas dapat membantu dalam

mengevaluasi kualitas sumber daya manusia, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan memberi petunjuk terhadap permasalahan sumber daya manusia.

Peningkatan Produktivitas semakin kompleks dengan ditemukannya masalah-masalah dalam sumber daya manusia setelah dilakukan pengukuran terhadap produktivitas sumber daya manusia itu tersebut. Peningkatan produktivitas dalam sumber daya manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan produktivitas pada faktor produksi lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya. Demokrasi dan tatanan ekonomi merupakan dua hal yang memiliki peran dan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan fundamen bangsa bagi negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Ada pertanyaan yang mengawali pembahasan selanjut yaitu tatanan ekonomi seperti apa yang paling baik mencapai nilai-nilai demokrasi, kesetaraan politik, dan kebebasan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membayangkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai ini, tetapi juga pada titik sejarah yang tidak biasa di mana kita menghadapi peluang luar biasa untuk menciptakan tatanan ekonomi baru.

Karena negara demokrasi mengajarkan adanya kesetaraan politik dan kesamaan didalam hukum, maka perlu adanya upaya untuk membangun tatanan ekonomi yang dapat membantu mewujudkan nilai-nilai ini, atau setidaknya tidak merusaknya. Maka, di

antaranya, tatanan ekonomi terbaik akan membantu menghasilkan distribusi sumber daya politik yang menguntungkan bagi tujuan demokrasi

Selain itu, perlu disadari bahwa sumber daya politik tidak hanya mencakup sumber daya ekonomi seperti pendapatan dan kekayaan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan serta otoritas khusus yang dimiliki oleh pejabat untuk mempekerjakan sumber daya dengan kapasitas yang tersedia untuk pemerintah negara. Jika kita tidak memiliki tujuan lain selain proses demokrasi, maka persyaratan dari proses itu akan, cukup baik, sepenuhnya mendominasi pemikiran kita tentang tatanan ekonomi. Tetapi kita mungkin secara wajar menuntut agar tatanan ekonomi kita juga adil. Dengan kata lain bahwa kesetaraan politik adalah bentuk keadilan distributif: Sekarang dapat dibayangkan bahwa distribusi sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk demokrasi mungkin juga terbukti identik dengan distribusi yang diperlukan untuk mencapai keadilan ekonomi. Jika demikian, memecahkan satu masalah secara bersamaan akan memecahkan yang masalah lainnya.

Dalam hal ini, kita akan membedakan antara dua jenis output: output kami sebagai nilai konsumen dan output kami sebagai nilai produsen. Sekarang kita asumsikan bahwa tatanan ekonomi kita saat ini dan tatanan baru yang diusulkan relatif sama dalam input dan output fisik, produktivitas, dan produk nasional bruto per kapita. Secara singkat, kami akan mencari suatu tatanan ekonomi yang akan mendesentralisasi banyak keputusan penting di antara perusahaan

ekonomi yang relatif otonom. Tatanan ini akan beroperasi dalam batas yang ditentukan oleh sistem pasar dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara demokratis. Desentralisasi semacam itu akan menuntut otoritas yang signifikan untuk membuat keputusan penting dalam perusahaan. Karena itu pertanyaan yang harus kita hadapi adalah, Bagaimana seharusnya otoritas ini dijalankan di dalam perusahaan? Kita berharap perusahaan dapat menjadi perpanjangan tangan dari birokrasi pusat negara. Dengan kata lain bahwa semua otoritas yang strategis dalam perusahaan harus dilaksanakan secara hierarkis oleh pejabat negara. Saya juga berasumsi bahwa kita akan mencari alternatif untuk kapitalisme perusahaan, di mana otoritas dalam perusahaan dijalankan secara hierarkis oleh manajer yang secara normatif bertanggung jawab kepada pemegang saham. Masalah kita adalah menemukan alternatif yang lebih baik. Ada kebutuhan untuk menerapkan kekakuan intelektual yang sedang berlangsung untuk memahami implikasi baru atau potensial, ketika waktu terus berubah dengan cepat. Dengan demikian, beberapa tren global disajikan di bawah ini. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya arti dampak dan pengaruhnya bagi manusia? Dan yang penting, jika ini adalah tren global, menyiratkan bahwa cepat atau lambat, itu akan terjadi di sebagian besar negara. Lalu apa strategi yang paling efektif untuk beradaptasi dan mengelola tren ini dengan sukses di masing-masing negara, organisasi ataupun industri? Beberapa tren global utama adalah: globalisasi dan integrasi ekonomi;

teknologi dan dampaknya; penyesuaian struktural dan privatisasi; memastikan pembangunan berkelanjutan, munculnya sistem kerja baru, pergeseran dari administrasi personalia ke upaya SDM yang terfokus secara strategis; perubahan gaya kepemimpinan dari birokrasi ke kewirausahaan; perubahan budaya organisasi dari birokrasi yang menolak risiko menjadi inovatif dan organisasi yang efektif.

Globalisasi didefinisikan, sebagai proses di mana negara-negara meningkatkan saling keterkaitan dan saling ketergantungan mereka melalui penyebaran demokrasi, dominasi kekuatan pasar, integrasi ekonomi di pasar dunia, transformasi sistem produksi dan tenaga kerja, penyebaran perubahan teknologi dan revolusi media. Dalam dunia baru daya saing global ini, skenario ideal adalah keseimbangan dinamis antara penciptaan kekayaan dan keterpaduan sosial, dengan pemerintah menyeimbangkan kebutuhan untuk kebijakan lokal, sosial, nilai tambah (misalnya kebijakan ekonomi) terhadap kebutuhan untuk mengembangkan keunggulan komparatif bagi negara untuk berpartisipasi aktif dalam integrasi rantai nilai global. Sementara beberapa kebijakan lokal, sosial, dan nilai tambah dipandang oleh beberapa pihak sebagai kebijakan yang berorientasi pasar. Suatu hal yang tidak ada gunanya di negara yang kaya raya, sementara masyarakat asli negara itu miskin dan terbelakang.

Masalah kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah, dan masyarakat, adalah

bagaimana membiayai kebijakan sosial ini, apakah privatisasi dan kekuatan pasar bebas akan mengurangi beban biaya, dan bagaimana mengelola biaya sosial dengan peningkatan efisiensi (misalnya Pengangguran). Bahkan di mana pemerintah memiliki kebijakan ekonomi politik yang baikpun dapat terseret oleh arus global. Globalisasi semakin menghasilkan internasionalisasi pasar domestik sebelumnya seperti supermarket dan rantai bisnis lainnya. Dalam tinjauan literatur terbaru tentang kekuatan organisasi, Fincham (1992) meninjau kontribusi struktural untuk membangun pemahaman kita tentang subjek dan menunjukkan bahaya bila terlalu menekankan perilaku politik dengan cara mengorbankan struktur. Struktur organisasi menarik batasan di sekitar kegiatan individu dan kelompok dan membantu menentukan dan mengembangkan hubungan di antara mereka. Struktur informal dalam suatu organisasi juga dapat dikatakan muncul dari nilai-nilai, persepsi dan motivasi individu yang berinteraksi dalam struktur formal. Struktur, baik formal maupun informal, bersifat politis karena dapat membantu atau menghambat kemampuan individu dan kelompok untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu cara utama di mana struktur mempengaruhi proses pengaruh adalah dalam akses yang mereka berikan atau tolak ke ranah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, struktur memengaruhi kekuatan individu dan kelompok.

Representasi yang tidak merata dari fungsi dan spesialisasi yang berbeda

memberikan struktur yang tidak hanya menjadi perhatian dalam kaitannya dengan karir individu tetapi yang memiliki implikasi mikro-politik untuk akses ke pengambilan keputusan. Oleh karena itu juga mempengaruhi hubungan antara basis pengetahuan organisasi dan proses pengambilan keputusan. Meskipun mendukung kepentingan individu dan kelompok tertentu, itu juga memberi bobot lebih besar pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam pengambilan keputusan. kontinjensi strategis organisasi (Salancik dan Pfeffer, 1977), sehingga mencocokkan proses internal dengan keadaan eksternal. Agar hal ini terjadi, mereka yang memiliki kekuasaan paling besar dalam proses pengambilan keputusan haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang paling dibutuhkan.

Sistem berpikir ekonomi politik dapat digunakan dikembangkan untuk menelaah dan memahami sistem ruang, terutama ruang kehidupan. dengan telaah ekonomi politik, kita bisa memahami hal-hal berikut dalam sistem ruang kehidupan: (a) persoalan dinamika power, wealth dan privilege; (b) interaksi dan dinamika inter relasi antar aktor; (c) nilai-nilai, kelembagaan serta proses produksi dan reproduksinya; (d) dinamika akumulasi power, wealth, dan privilege yang terjadi; (e) struktur ruang kehidupan yang terbangun; dan (f) struktur distribusi dan keadilan yang berkait dengan power, wealth, dan privilege. Sistem ruang kehidupan diartikan sebagai ranah interaksi manusia atau satuan organisasi dengan

lingkungannya melalui proses, ekonomi, politik, budaya, keyakinan, kebijakan, dan manajemen dengan segala prasarananya. Interaksi ini bisa bersifat fungsional dan teritorial ataupun horisontal dan vertikal. Interaksi ini dapat berlangsung secara alamiah atau struktural, dengan sifat kompetitif maupun yang hegemonik. Lingkungan kerja bahkan wilayah suatu negara telah menjadi suatu sistem ruang kehidupan yang melahirkan nilai dan pergulatannya, maka lingkungan kerja bisa dipahami melalui perspektif ekonomi politik sistem ruang kehidupan. lingkungan ini juga dapat dilihat dalam lingkup industri atau perusahaan yang berbasis sistem ruang fisik. Oleh karena itu, telaah ekonomi politik sistem ruang kehidupan yang dikembangkan dalam makalah ini akan dipergunakan untuk menelaah ruang politik negara dalam interaksinya dengan pengembangan bisnis untuk direlasikan dalam upaya membangun kesejahteraan umum yang hakiki.

III. Hasil dan Pembahasan

Manusia perlu dilihat dari perspektif pemegang amanah atas bumi dan segala sesuatu yang ada bersamanya. Manusia hari ini adalah manusia yang sudah terkotak-kotakkan oleh batas politik atau geografis. Jika kita menganggap negara adalah suatu kawasan yang terintegrasi dan sangat luas, yang di dalamnya terdapat keberadaan ruang dan fungsinya yang berbeda-beda. Jika kita mengasumsikan bahwa bangunan yang ada di dalam kawasan itu adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang terhubung oleh interaksi bisnis yang

membentuk industri. Karena input dan output dalam interaksi tersebut berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas, maka terbentuklah jenis-jenis industri. Industri biasanya lahir dari sebuah masalah yang kemudian dikaitkan dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang sangat dinamis. Dahulu interaksi manusia dengan model konvensional, tidak memungkinkan untuk menjalin komunikasi secara cepat dan massif antara satu dengan lainnya. Namun hal itu berbeda dengan zaman sekarang yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0. determinasi teknologi telah mentransformasikan perilaku masyarakat dari suatu pola ke pola yang lain dengan sangat cepat.

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat canggih memungkinkan terjadinya infiltrasi terhadap ruang-ruang privat, baik itu skala individu, keluarga, organisasi, bahkan negara sekalipun. Sehingga dengan prinsip, *there is a man behind the gun*, maka kita pun dapat meyakini bahwa ada aktor intelektual yang terlibat di dalam skenario revolusi industri ini. Banyak kebutuhan yang ada, justru bukan berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan diciptakan oleh teknologi tersebut. Teknologi telah berhasil mensubstitusi antara kebutuhan dan keinginan manusia. Selama ini kita anggap hanya sebuah keinginan, kemudian menjadi sebuah kebutuhan. Demikian sebaliknya, yang dahulunya kebutuhan, akhirnya terdegradasi menjadi sebuah keinginan. Contoh yang bisa dikemukakan disini adalah sikap kita, jika sedang membutuhkan informasi.

Dulu kita biasanya akan mencari informasi jika ada keperluan yang ingin dikerjakan, biasanya dilakukan dengan secara fisik melalui cara mendatangi orang atau unit layanan yang berhubungan dengan informasi (bisa berupa produk atau jasa) yang diperlukan. Sehingga aktifitas bisnis seseorang dapat diukur berdasarkan volume atau frekuensi aktifitasnya yang dilakukannya. Sehingga lalu lintas orang menjadi salah satu ukuran geliat bisnis suatu daerah. Keadaan seperti sudah berubah dengan adanya kemajuan teknologi. Para pelaku bisnis melakukan aktifitasnya yang bermacam-macam (multi tasking) hanya dengan menggunakan jari. Selain itu, kita tidak perlu melakukan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi untuk memperoleh informasi ataupun mendapatkan suatu produk/jasa. Dalam kultur masyarakat yang selama ini identik dengan silaturahmi, apalagi di hari raya, namun saat ini sudah semakin berkurang. Manusia modern relatif tidak terlalu membutuhkan silaturahmi secara fisik lagi. Hal itu dapat dipahami, karena sudah ruang interaksi sudah menjadi sedemikian dekatnya, bahkan melampaui batas ruang dan waktu.

Jadi teknologi telah merubah wajah bisnis dunia saat ini. Framework bisnis sudah berubah dari human-centric menjadi robot-centric. Manusia modern telah berhasil membawa teknologi menjadi alat yang pada akhirnya akan mendehumanisasi dirinya sendiri. Bahkan dalam perkembangannya, entah sadar atau tidak, manusia telah menciptakan replikasi dirinya dalam

bentuk robot dengan artificial inteligent. Sumber daya manusia yang selama ini menjadi salah satu sumber daya yang sangat dibuthkan dalam proses produksi, tersubstitusi dengan peran robot. Hal ini berdampak pada pertumbuhan bisnis tidak lagi membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di tempat lokasi bisnis itu berada. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi dari faktor sumber daya manusia menjadi tidak relevan lagi. Dengan kata lain, pertumbuhan pusat-pusat bisnis baru tidak lagi secara signifikan membutuhkan tenaga kerja ala human power. Sehingga tingkat pengangguran yang tinggi menjadi sebuah keniscayaan ditengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. apakah ini kesalahan manusia yang menciptakan robot tersebut? Apakah kehadiran robot tersebut merupakan salah satu solusi kekinian untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap manusia? Krisis kepercayaan disini, bermakna ganda. Yang pertama datang dari kurangnya pengetahuan dan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dalam proses bisnis. Yang kedua krisis kepercayaan tersebut lahir dari adanya beberapa sikap mental negatif yang dimiliki manusia seperti tidak jujur, manipulatif dan tidak disiplin. Kedua hal tersebut bisa direduksi oleh kehadiran sebuah robot.

Teknologi telah “merampas” sebagian (bahkan sebagian besar) pekerjaan manusia. Hubungan antara manusia pemodal dan manusia pekerja sudah tidak lagi menjadi hal yang penting dalam konteks ekonomi. Manusia

pekerja, cepat atau lambat, akan kehilangan posisi tawarnya terhadap pemilik modal yang direpresentasikan oleh pimpinan perusahaan. Sehingga nilai tawar mereka terhadap kesejahteraannya disaat perusahaan menuntut adanya peningkatan produktifitas, menjadi tidak strategis lagi. Karena perusahaan tidak lagi khawatir bila ada pekerja yang mogok kerja karena menuntut kesejahteraannya. Karena pekerja robotic telah “siap” menggantikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh manusia pekerja tadi. Jika teknologi itu suatu produk tunggal, siapa yang memproduksinya? Pertanyaan siapakah aktor di balik kemajuan teknologi yang menggunakan jargon internet of things (IoT) ini? Siapa yang paling bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya kemajuan teknologi? Menurut pendapat penulis, jawaban tunggal atas beberapa pertanyaan diatas adalah manusia pemodal (capitalist) dan para ilmuwan (saintist). Namun terhadap dua kelompok manusia ini, pemodal lah yang paling bertanggungjawab karena telah “membawa” inovasi teknologi tersebut ke ruang publik, sehingga berdampak terhadap masyarakat secara luas.

Selain terhadap Bisnis, dampak teknologi juga dirasakan terhadap sistem politik ruang. Teknologi dengan alat komunikasinya yang canggih, telah hampir menghilangkan sekat-sekat ruang, baik itu politik, budaya, maupun ideologi. Suatu negara dengan mudahnya “mempengaruhi” keputusan politik suatu negara dengan teknologi

komunikasi yang dijuluki sebagai media sosial. Demikian juga bagi suatu perusahaan, dengan cepatnya mendisrupsi perusahaan saingannya dalam industri sejenis sehingga tidak berdaya dan “dipaksa” mengakui kekalahannya dengan cara yang halus. Bahkan media sosial ini juga mempengaruhi eksistensi media lainnya seperti media elektronik dan media tulis. Media tersebut telah kehilangan sebagian konsumennya. Hal ini bisa dipahami, karena informasi yang mereka tawarkan sudah lebih dulu wara wiri di laman media sosial. Sebagian besar masyarakat sudah tidak perlu lagi membeli koran atau menonton televisi, karena semua yang mereka butuhkan pada dua media tersebut, sudah berhasil disediakan oleh media sosial yang memanfaatkan internet sebagai urat nadinya.

Perusahaan, bahkan negara sekalipun, sudah semakin kehilangan ruang-ruang privasi dan simbol kedaulatan dalam proses pengambilan keputusan, baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Pemodal yang berada di suatu negara atau perusahaan tertentu, dengan mudah “menjajakan” ideologi atau nilai yang dianutnya kepada perusahaan atau negara lain. Bahkan tidak sedikit, kita mendengar bahwa proses politik disuatu negara, merupakan hasil intervensi atau pengaruh dari negara lain. Kalau dahulu, suatu negara masih bisa memblokir dirinya dari pengaruh global yang di bawa oleh teknologi. Namun saat ini, hal tersebut hampir tidak mungkin dilakukan. Misalnya negara akan membatasi penggunaan internet, maka selain akan berhadapan

dengan hegemoni perusahaan atau negara adikuasa, juga akan berhadapan dengan arus protes dari rakyatnya sendiri. Masyarakat modern telah digiiring ke dalam peradaban baru yang lebih global. Peradaban ini nyaris menghilangkan perbedaan dikotomis dunia timur dan barat.

Ketahanan suatu perusahaan atau negara sangat ditentukan oleh kemampuan inovasi dan modal yang dimilikinya, untuk membentenginya dari pengaruh perusahaan/negara lain. Inovasi dapat menjadi multiplier factor bagi perusahaan dalam memperbesar modal dan asetnya. Inovasi ini bisa berbentuk peningkatan kualitas produk atau diversifikasi produk. Melalui inovasi juga, perusahaan dapat menjalankan menjatuhkan pesaingnya atau dengan memberinya pilihan untuk mengikuti strategi yang diinginkan oleh inovator tersebut. Dengan cara kedua, perusahaan tersebut telah berhasil mengambil alih atau paling tidak mempengaruhi keputusan yang diambil.

Dalam ruang yang lebih besar dari sebuah perusahaan, sebut saja ruang itu bernama negara. Dalam hal negara dimana perusahaan inovator itu berada, memiliki kepentingan politik atau ideologi, maka negara tersebut akan masuk ke dalam sistem ekonominya. Pintu masuknya bisa lewat pemberian pinjaman maupun lewat pengaruh perusahaan besar di negara itu. Sehingga dapat dipahami, dalam proses pengambilan keputusan politik biasanya dipengaruhi oleh intervensi kekuatan ekonomi. Bahkan lebih jauh intervensi kekuatan ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan hukum di

suatu negara. Jika hal tersebut terjadi, maka keberpihakan negara atau pemerintah terhadap kemaslahatan rakyatnya akan “terpasung” oleh kekuatan yang mengintervensi tersebut. Sehingga negara yang demikian itu meski tetap ada dan eksis tapi cenderung kehilangan martabat dan kedaulatannya. Pada akhirnya, masa depan negara tersebut, bisa jadi sangat bergantung dari keinginan dan kepentingan negara yang menguasainya. Dengan kata lain, penjajahan modern oleh negara adikuasa atau perusahaan raksasa saat ini, bukanlah merebut negara atau mematikan perusahaan lainnya tapi dengan memanfaatkan negara atau perusahaan tersebut sehingga dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan darinya.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu menarik koneksi dengan memeriksa konsep Demokrasi Ekonomi. Dengan menggunakan konsepsi Gramsci tentang "perang posisi", penulis mencoba menganalisis bagaimana konsep Demokrasi Ekonomi dapat dijadikan model alternatif untuk mengubah dinamika politik historis dari peran yang dimainkan pekerja dalam sistem ekonomi kita. Demokrasi Ekonomi menggunakan teori kontra-hegemoni yang menggeser paradigma hubungan kerja.

Kalau demokrasi politik manifestasinya dapat dilihat pada proses pemilihan pemimpin negara atau senator melalui mekanisme pemilihan langsung oleh seluruh rakyat, maka demokrasi ekonomi pun dapat dikembangkan dengan filosofi yang sama. Dalam

demokrasi ekonomi ini, model penentuan keputusan strategi dalam rangka penguatan landasan ekonomi negara dilakukan dengan prinsip bahwa landasan ekonomi dibangun diatas nilai keadilan dan persatuan seluruh elemen bangsa. Dalam pelaksanaan aktifitas ekonomi dan bisnis, negara melibatkan semua elemen masyarakat secara proporsional dan sesuai dengan passion yang dimiliki. dalam hal keterbatasan dana, negara sebaiknya menyiapkan skim anggaran untuk pendanaan kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh elemen masyarakat sesuai dengan fokus pengembangan rencana bisnis yang diarahkan oleh negara. Hal itu dilakukan dalam rangka penguatan infrastruktur ekonomi masyarakat agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berkesinambungan (sustainability) dan memberi kontribusi massif terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara perlu memfasilitasi pengembangan sikap kewirausahaan secara sistematis. Pembagian zona bisnis didesain sedemikian rupa agar terkoneksi baik secara fungsional maupun struktural. Infrastruktur dasar di bangun disesuaikan dengan bisnis wilayah. Sehingga negara dapat dengan menentukan prioritas berdasarkan urgensi wilayah dan jenis komoditas yang akan dihasilkan. Badan Usaha Milik Negara di dorong untuk menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam demokrasi ekonomi, aksesibilitas dan azas persamaan hak bagi seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal masyarakat memiliki kelebihan

modal, melalui mekanisme yang ditetapkan oleh negara, wajib mensubsidi masyarakat di wilayahnya secara proporsional. Tentu saja, selain subsidi silang antar sesama masyarakat, pemerintah juga tetap menyiapkan skim anggaran untuk mengisi gap modal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendaftaran jenis bisnis yang akan dikembangkan masyarakat mengikuti rasio kepadatan usaha di wilayah tersebut. Potensi sumber daya dan muatan lokal yang ada di suatu wilayah perlu menjadi pertimbangan para pakar, dalam proses teknokratik, dalam penyusunan peta prioritas bisnis beserta fungsi turunannya. Dengan jejaring dan desain bisnis yang dibangun di atas dasar demokrasi ekonomi tersebut, diharapkan tercipta kesejahteraan bersama secara proporsional dengan tingkat kesenjangan yang relatif kecil.

Jika keadaan ekonomi masyarakat secara umum membaik, diharapkan tidak lagi terjadi eksploitasi manusia secara ekonomi, karena interaksi yang dilakukan menggunakan prinsip simbiosis mutualisme yang produktif. Pada kondisi tersebut, ruang-ruang geografis maupun kultural dapat saling berinteraksi secara harmoni dalam rangka membangun kesejahteraan bersama.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas fakta empiris yang diamati di atas, ada beberapa hal yang dijadikan kesimpulan yaitu:

1. Peletakkan dasar ekonomi yang kuat dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat

membantu pertumbuhan ekonomi negara secara berkesinambungan;

2. Demokrasi ekonomi diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam menempatkan peran dan fungsi pengembangan bisnis agar tetap sejalan dengan arah kebijakan negara yang dibangun di atas landasan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Demokrasi ekonomi dapat memperkecil gesekan antar ruang, baik dari dimensi kewilayahan, budaya, administrasi pemerintahan, dan agama;
4. Pemerataan akses dan ketersediaan infrastruktur relatif merata antar wilayah, karena penyediaannya sudah memperhitungkan kebutuhan atas pertumbuhan wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada.

Saran yang dapat diajukan dalam makalah ini adalah:

1. Kajian ekonomi berbasis penguatan wilayah dan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar selalu ada inovasi.
2. Pengembangan model demokrasi ekonomi perlu dilakukan penyesuaian sesuai dinamika yang ada.

Daftar Pustaka

- [1] Alfredo Carlos Marquez (2015). *Economic Democracy: From Continual Crisis to a People Oriented Economy*. Dissertation

Doctor Of Philosophy In Political Science.

- [2] Ghgh Razvan & Marius Lixandrub (2015). The Influence of the Social, Political and Economic Impact on Human Resources, as a Determinant Factor of Sustainable Development. 3rd Global Conference On Business, Economics, Management and Tourism, 26-28.
- [3] Gillian Biscoe. *Human Resources : The Political and Policy Context*. The Bellettes Bay Company Pty Ltd, Australia.
- [4] Hans-Martin Zademach & Sebastian Hillebrand (2013). *Alternative Economies and Spaces: New Perspectives for a Sustainable Economy*. 156 p., 21,99 €. ISBN 978-3-8376-2498-4
- [5] Joyo Winoto. *Moral dan Etika Bisnis & Ekonomi Politik Ruang dalam pengembangan Bisnis.*;
- [6] Ryan, M. (1995). *Human resource management and the politics of knowledge: linking the essential knowledge base of the organization to strategic decision making*. *Leadership & Organization Development Journal*, 16(5), 3–10.